



Opini WTP

Harus Berdampak pada Pelayanan ke Masyarakat



TERIMA LAPORAN PEMERIKSAAN: Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Sambas saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah.

SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas, Satono, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar. "Opini WTP ini harus menjadi pemicu peningkatan kinerja OPD agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,

khususnya dalam aspek pelayanan publik," ujar Satono.

Menurutnya, capaian ini merupakan sinyal positif atas pengelolaan keuangan daerah. Namun, hal tersebut juga menuntut perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Satono menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi komitmen untuk segera ditindaklanjuti. "Semua rekomendasi dari BPK wajib dipatuhi. Ini juga menjadi tanggung jawab moral kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar, turut memberikan apresiasi atas raihan WTP yang berhasil dipertahankan sejak tahun 2017. "Alhamdulillah,

ini adalah capaian beruntun sejak 2017. Kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemkab Sambas atas kerja keras yang dilakukan," ujarnya.

Namun demikian, Abu Bakar juga mengingatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara lebih cermat dan efisien. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi dari BPK. "Kami di legislatif akan terus melakukan pengawasan. Eksekutif harus segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan agar tata kelola keuangan semakin akuntabel dan transparan," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Semoga ke depan, kualitas

pengelolaan keuangan di Kabupaten Sambas semakin meningkat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," harapnya. (fah)